

IMPLIKASI PEMENUHAN HAK EKOSOB MASYARAKAT TEMAJUK TERHADAP KETAHANAN NASIONAL INDONESIA *

Dian Widyaningrum**, Endri***, Fardi Prabowo Jati****, dan Rayvo Rahmatullah*****

Peneliti Program Kreativitas Mahasiswa, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Abstract

The purpose of the research is to explain if the fulfillment of economic, social, and cultural (ecosoc) rights in Temajuk as a borderland are affecting national defense of Indonesia. In order to prove said argument, the research will describe the view of fulfillment as a reality of those rights' fulfillment explained beforehand, review efforts from the government, and finally observe the correlation between them with the conception of national defense. Temajuk has some limitations and lack of infrastructures needed to support the optimal fulfillment of economic, social, and cultural rights, specifically to the three main sectors, namely education, health, and food, despite the guarantee of those rights by Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 on Ratification of International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR).

Keywords : Temajuk, borderland, ecosoc rights, national resilience.

Intisari

Penelitian ini berusaha menjelaskan apakah pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) masyarakat Temajuk sebagai masyarakat yang berdomisili di daerah perbatasan memberi pengaruh terhadap ketahanan nasional Indonesia. Untuk membuktikan argumen tersebut, penelitian ini akan mendeskripsikan gambaran pemenuhan sebagai sebuah realita pemenuhan hak ekosob, meninjau upaya pemenuhan hak ekosob oleh Pemerintah, dan melihat korelasi kedua hal tersebut dengan konsepsi ketahanan nasional. Temajuk memiliki keterbatasan dan kekurangan infrastruktur yang mampu menunjang proses terpenuhinya hak ekosob secara optimal, spesifik terhadap tiga sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pangan. Padahal hak-hak tersebut telah dijamin dalam Undang- Undang Nomor 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant On Economic, Social, And Cultural Rights (ICESCR).

Kata Kunci: Temajuk, perbatasan, hak ekosob, ketahanan nasional.

Pokok Muatan

A. Latar Belakang	24
B. Metode Penelitian	25
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	25
1. Gambaran Upaya Pemenuhan Hak Ekosob oleh Pemerintah Daerah	25
2. Upaya Negara dalam Memenuhi Hak Ekosob Masyarakat Temajuk dan Korelasi antara Pemenuhan Hak Ekosob Masyarakat Temajuk terhadap Ketahanan Nasional	32
D. Kesimpulan	35

* Penelitian didanai dalam Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2016.

** Alamat korespondensi : dianwidya9@gmail.com

*** Alamat korespondensi : endri.ismail.94@gmail.com

**** Alamat korespondensi : fardi.prabowo.88@gmail.com

***** Alamat korespondensi : rayvorahmatullah13@gmail.com

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara welfare state menyebabkan negara harus banyak “turun tangan” di berbagai sektor pembangunan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Bukti konkret atas tanggung jawab negara ini ialah Pemerintah menelurkan kebijakan-kebijakan dalam berbagai sektor pemerintahan untuk memberikan pelayanan maksimal dan memberikan jaminan akan pemenuhan hak-hak masyarakat sehingga masyarakat adil, makmur, dan sejahtera dapat terwujud.

Pemenuhan hak-hak ini dijamin dalam Konstitusi Indonesia sebagai landasan penyelenggaraan negara dan lebih jauh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovensi Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengatur agar negara benar-benar memperhatikan pemenuhan hak-hak ini. Realitanya, tidak semua hak-hak Ekosob yang seharusnya mampu dijamin oleh negara dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi di wilayah-wilayah terdepan Republik ini (daerah perbatasan) yang jauh dari pusat pemerintahan sungguh dalam kondisi yang memprihatinkan.

Wilayah perbatasan selalu mengundang perhatian besar. Dinamika kehidupan sosialnya membuat kita terperanjat. Perbatasan menjadi kata-kata yang identik dengan “keterbatasan”, seakan-akan sinonim. Realita yang ada mengukuhkan hipotesa ini. Kondisi wilayah perbatasan Indonesia masih berkuat pada berbagai keterbatasan, secara infrastruktur maupun tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Di sisi lain, terbatasnya sumber daya yang ada dan akses wilayah membuat seringkali daerah perbatasan menjadi bukti nyata minimnya perhatian pemerintah kepada daerah-daerah tersebut.

Sebagai beranda terdepan suatu negara, daerah perbatasan menjadi tameng utama menghadapi derasnya berbagai ancaman eksternal negara, baik itu ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Lebih menarik lagi wacana daerah perbatasan sebagai pintu gerbang utama negara, konsekuensinya bahwa perbatasan menjadi wajah bagaiman

kondisi Indonesia dalam banyak hal. Namun, disisi lain, seringkali kesejahteraan masyarakatnya hanya menjadi prioritas kesekian dari agenda pembangunan pemerintah. Sehingga orientasi pembangunan perlu diluruskan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan sangat dibutuhkan demi menjaga setiap jengkal bumi Indonesia ini tetap dirasa dimiliki oleh mereka, rakyat Indonesia sendiri. Dalam konteks ini, Temajuk sebagai daerah perbatasan memiliki peran strategis sebagai prototipe dalam menilai ketahanan nasional Indonesia di daerah perbatasan.

Kondisi infrastruktur untuk Desa Temajuk jika ditinjau dari kebutuhan minimal masyarakat dapat dikatakan sudah tersedia meskipun belum memadai. Kondisi sarana jalan dari kota kecamatan menuju Desa Temajuk (sepanjang kurang lebih 46 km) sudah tersedia dengan kondisi: 10 km aspal/beton rusak; 25 km jalan tanah urug. yang sedang dikerjakan Dinas PU dan 11 km (di penghujung masuk desa) jalan pasir yang sangat membahayakan masyarakat pengendara motor. Jalan antar dusun di desa sebagian sudah beraspal, sebagian lagi adalah rabat beton yang dibiayai oleh PNPM dan swadaya warga masyarakat. Kondisi jalan darat sebagaimana tersebut baru dinikmati warga masyarakat Temajuk pada awal tahun 2011 yang lalu. Sebelumnya untuk menuju kota kecamatan masyarakat melalui pinggiran pantai (dengan sepeda motor) saat air laut surut antara jam 07.00 hingga 14.00.

Kondisi masyarakat yang masih jauh dari fasilitas dan sarana yang memadai seperti listrik, jalan raya, kebutuhan pangan, sinyal untuk komunikasi menjadi bukti bahwa tidak semua wilayah terdepan Indonesia mendapat perhatian selayaknya, demikian pula kondisi yang tergambar di desa Temajuk. Disinilah yang penulis sebut “absennya” peran negara. Tentu hal ini berisiko besar bagi ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana kita belajar dari kasus Timor Timur. Lepasnya wilayah ini -yang notabene juga merupakan wilayah perbatasan- salah satunya tidak jauh dari faktor kesejahteraan yang tidak mampu dipenuhi oleh Pemerintah sehingga mereka

memilih untuk melepaskan diri. Dalam konteks ini, strategi kewarganegaraan seharusnya digunakan Pemerintah agar wilayah terdepan tidak lepas begitu saja, dan ini mempersyaratkan terpenuhinya hak-hak untuk menjamin keberlangsungan hidup yang sejahtera. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas ialah: **Pertama**, Bagaimana gambaran pemenuhan hak Ekosob di Temajuk? **Kedua**, Bagaimana upaya negara dalam memenuhi hak ekosob masyarakat Temajuk dan korelasi antara pemenuhan hak ekosob masyarakat Temajuk terhadap ketahanan nasional?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis-empirik dengan pendekatan etnografi, yaitu penelitian yang memperoleh data dengan cara melihat secara langsung bagaimana kondisi masyarakat sebagaimana adanya, kemudian hasilnya dianalisis menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada secara komprehensif. Untuk meningkatkan keakuratan data yang diperoleh, peneliti juga melakukan penilaian dengan pendekatan etnografi, dimana pendekatan yang menekankan pada penggambaran kehidupan secara utuh yang diamati dari dalam lingkungan masyarakat tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan observasi selama periode waktu tertentu.

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif menghasilkan data yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan sebab dan proses terjadinya peristiwa yang di alami suatu masyarakat. Penelitian ini mempelajari suatu kondisi mengenai ekonomi, sosial, dan budaya dalam masyarakat (dalam hal ini masyarakat Temajuk). Selain itu, penelitian ini juga mempelajari dampak yang ditimbulkan dari pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam masyarakat Temajuk terhadap ketahanan nasional.

Ada beberapa teknik pengumpulan data

yang digunakan seperti yang telah disebutkan diatas yaitu melakukan wawancara mendalam dan observasi. Wawancara juga dilakukan pada instansi pemerintah terkait untuk memperoleh data sekunder. Selain itu, peneliti juga melakukan studi literatur untuk menunjang data-data yang telah ditemukan dilapangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Upaya Pemenuhan Hak Ekosob oleh Pemerintah Daerah

a. Hak Pangan

Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB mengemukakan bahwa pelanggaran hak atas pangan terjadi pada saat negara gagal menjamin, sekurang-kurangnya, pemenuhan tingkat paling minimum yang diperlukan agar terbebas dari kelaparan. Banyak permasalahan mendasar mengenai pemenuhan pangan di Desa Temajuk. Permasalahan ini menjadi penyebab terhalangnya hak masyarakat untuk menikmati pangan secara optimal. Pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimum bidang pangan melalui Permentan RI Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010. Dalam Pasal 3 Permentan tersebut menjelaskan “Dalam hal ketentuan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar yakni Ketersediaan dan Cadangan Pangan; Distribusi dan Akses Pangan; Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan Penanganan Kerawanan Pangan.¹ Kondisi di Temajuk untuk keempat jenis pelayanan tersebut masih tergolong buruk.

Pertama, ketersediaan dan cadangan pangan di Temajuk sangat kurang. Sebagian besar bahan pangan yang utama bagi masyarakat diperoleh dari desa lain yang merupakan bagian dari Malaysia.

¹ Pasal 3 Permentan RI Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010.

Masyarakat Temajuk lebih cenderung untuk mengonsumsi beras Malaysia yang sebenarnya diperuntukkan bagi kebutuhan domestik warga Malaysia. Hal yang sama juga terjadi pada sembako lain seperti gula. Beberapa alasan masyarakat banyak menggunakan sembako dari Malaysia diantaranya disebabkan toko-toko sembako yang ada di Temajuk kebanyakan menyediakan beras domestik Malaysia. Meskipun tersedia beras yang berasal dari Indonesia, namun jumlahnya terbatas. Akibatnya ketersediaan pasokan beras dan gula Malaysia lebih banyak dan lebih mudah diperoleh di toko-toko. Fakta ini diperjelas kembali dengan adanya sebuah koperasi swadaya yang menjalankan usahanya sebagai agen pemasok beras dari Malaysia ke toko-toko di Temajuk. Selain itu, ada anggapan bahwa beras dan gula Malaysia memiliki kualitas yang relatif lebih baik dibandingkan komoditas asal Indonesia.

Kedua, distribusi pangan ke Temajuk sangat terkendala akses sehingga jumlah pangan yang sampai sangat terbatas. Hal ini disebabkan akses transportasi ke Temajuk cukup sulit. Perjalanan dari pusat kabupaten Sambas ke Temajuk ditempuh selama lima sampai enam jam dengan kondisi jalan yang buruk. Sedangkan perjalanan dari pusat kecamatan Paloh sendiri dibutuhkan waktu dua sampai tiga jam dengan medan jalan yang sebagian besar masih merupakan tanah liat berlubang. Hal ini diperparah dengan jembatan-jembatan sederhana yang terbuat dari susunan papan kayu dan pohon kelapa sehingga tingkat keamanannya sangat rendah. Keadaan ini diperparah lagi ketika musim penghujan tiba, dimana jalan menjadi berlumpur, lubang besar pada jalan digenangi air, dan terkadang jembatan ikut hanyut terbawa arus air. Akses jalan yang sulit

menyebabkan biaya transportasi ke Temajuk menjadi mahal. Ditambah lagi karena biaya penyeberangan sungai untuk mobil yang berkisar Rp. 50.000 s.d Rp. 100.000 . sehingga beberapa bahan kebutuhan pokok juga ikut mahal jika sampai ke Temajuk.

Ketiga, penganeekaragaman dan keamanan pangan yang rendah. Mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah nelayan dan Temajuk termasuk penghasil ikan yang cukup tinggi sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan ikan dengan harga yang terjangkau. Hal ini mendorong sulitnya tersedia variasi untuk menikmati lauk seperti ayam dan daging. Selain karena jarang pedagang yang menyediakannya juga dikarenakan harganya yang lebih mahal dari ikan.

Keempat, desa Temajuk tergolong daerah rawan pangan. Menurut penjelasan pasal 4 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan bahwa “yang dimaksud dengan ”masyarakat rawan pangan” adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau akses pangan”.² Temajuk memenuhi semua kriteria tersebut.

Kondisi yang demikian terjadi ketika tiba musim penghujan yang memutus akses distribusi pangan ke Temajuk, baik yang dari Indonesia maupun dari Malaysia. Pendistribusian dari kecamatan Paloh tidak dapat dilakukan karena kondisi jalan yang tidak bisa dilewati mobil dan kebanyakan jembatan hanyut atau rusak. Sedangkan, jika menggunakan jalur laut terkendala gelombang

² Penjelasan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360).

tinggi. Kondisi yang sama juga terjadi pada pasokan dari desa lain Malaysia yang pendistribusian dari wilayah kecamatannya hanya dapat ditempuh dengan jalur laut.

Dalam pasal 1 angka (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas, menyatakan “Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan dasar”³. Salah satu yang menjadi urusan wajib pemerintah Kabupaten Sambas dalam perda tersebut ialah bidang pertanian dan ketahanan pangan. Di dalamnya dijelaskan bahwa pemerintah harus melakukan berbagai hal untuk dapat mencapai ketahanan pangan bagi masyarakat. Di antaranya pemerintah harus dapat menyediakan dan mengembangkan lahan pertanian untuk masyarakat, selain itu juga melakukan pembinaan sekaligus mengevaluasi hasil dari pertanian rakyat.

Realita yang ditemui di Temajuk saat ini hanya tersedia lahan pertanian khususnya sawah untuk dikelola masyarakat seluas 50 Ha, sangat kecil untuk skala sebuah desa, dengan status lahan percobaan. Hasil padi yang diperoleh belum mencukupi kebutuhan padi masyarakat desa dan pengelolaannya sangat bertumpu pada bantuan dana pemerintah. Terkait dengan terputus akses pendistribusian pangan setiap musim penghujan hingga saat ini belum ada solusi yang signifikan dari Pemerintah seperti percepatan pembangunan jalan dan jembatan untuk mengatasi hal ini.

b. Hak Atas Kesehatan

Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (SPM) di Kabupaten/Kota. Menurut pasal 1 ayat (1) Permenkes tersebut, standar pelayanan

minimal bidang kesehatan adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota.⁴ Di dalam SPM itu juga diatur indikator-indikator capaian yang harus dipenuhi oleh Pemerintah sebagai wujud pemenuhan hak atas kesehatan kepada masyarakat, termasuk masyarakat Temajuk yang berada di daerah perbatasan dan jauh dari ibu kota kecamatan sekalipun.

Secara garis besar, Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan mencakup 4 komponen utama, yaitu pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB), dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pertama, komponen pelayanan kesehatan dasar secara umum meliputi 1) perawatan ibu hamil, 2) perawatan bayi dan anak-anak, 3) penemuan dan perawatan penyakit, dan 4) perawatan masyarakat miskin. Perawatan ibu hamil di Desa Temajuk dalam 5 tahun terakhir ini sudah terfasilitasi dengan adanya Pos Bersalin Desa (Polindes) dan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang siap merawat ibu hamil. Kondisi ini mengarah ke arah yang lebih baik dimana pada tahun 2015 dibangun sebuah puskesmas di Temajuk dengan dua orang bidan dan seorang dokter umum. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Puskesmas Temajuk, sepanjang tahun 2015 tidak ada kasus kematian ibu maternal dan kematian bayi.

Perihal perawatan bayi, di Desa Temajuk kasus bayi dengan berat badan lahir rendah sudah dapat ditangani sesuai dengan prosedur yang ada. Bayi-bayi di Desa Temajuk cukup mendapatkan ASI eksklusif. Sementara untuk pemeriksaan kesehatan SD/MI, SMP, dan SMA berdasarkan data

³ Pasal 1 angka (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 2).

⁴ Pasal 1 ayat (1) Permenkes Nomor 741/Menkes/per/VII/2008.

yang peneliti dapat dari Puskesmas belum mencapai target 100%. Sementara itu, balita yang mendapatkan imunisasi lengkap sudah menacapai 98,74%. Penemuan dan perawatan penyakit desa Temajuk sudah cukup tertangani. Lima tahun terakhir, sudah ada seorang mantri dan bidan yang siap melakukan perawatan penyakit masyarakat Temajuk. Semenjak beroperasinya Puskesmas Temajuk, penemuan dan perawatan penyakit Temajuk semakin optimal dengan terdapatnya 14 tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas. 14 tenaga kesehatan tersebut antara lain: Kepala Puskesmas, seorang dokter umum, lima orang perawat kesehatan, seorang perawat gigi, seorang bidan kesehatan, seorang petugas gizi, petugas laboratorium, seorang petugas kesehatan lingkungan, dan seorang petugas kebersihan. Untuk perawatan masyarakat miskin, angka cakupan penduduk Temajuk yang telah mendapat jaminan kesehatan masih rendah. Dari data yang diperoleh peneliti dari Puskesmas Temajuk, penduduk yang sudah mendapat jaminan kesehatan baru mencapai 6,75%. Hal itu disebabkan karena susahnya akses jalan keluar Temajuk untuk mengurus jaminan kesehatan.

Kedua, pelayanan kesehatan rujukan. Oleh karena akses jalan menuju rumah sakit rujukan sangat susah, maka pelayanan rujukan di Desa Temajuk masih buruk. Keadaan tersebut diperparah karena hingga tahun 2016 ambulan Puskesmas Temajuk belum beroperasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan rujukan masyarakat Temajuk masih kurang baik.

Ketiga, penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa. Berdasarkan data dari puskesmas Temajuk, tidak ada laporan kejadian luar biasa yang terjadi di Desa Temajuk dalam kurun waktu 2010-2015. Keempat, promosi kesehatan. Tahun 2015 sebanyak 22% dari 100 rumah

yang dipantau telah dinyatakan ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sedangkan untuk lingkungan sehat, sebanyak 4,2% dari 100 rumah yang dipantau dinyatakan sebagai rumah sehat. Selain itu, terdapat 2 posyandu balita dan 1 buah posyandu lansia yang masih rutin berjalan. Dari data tersebut, maka dapat dilihat bahwa promosi kesehatan di Desa Temajuk masih rendah.

Di Desa Temajuk sudah terdapat sebuah Puskesmas yang dibangun tahun 2015. Meski belum diresmikan, puskesmas temajuk sudah beroperasi. Jika ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, puskesmas temajuk masih belum ideal. Hal itu karena masih ada beberapa ketentuan minimal yang harus dimiliki sebuah puskesmas yang belum terpenuhi, antara lain :

- 1) Belum terdapat apotek sehingga urusan kefarmasian terganggu. Selain itu, akses jalan menuju dinas yang sulit membuat distribusi obat-obatan juga terganggu. Jika obat di Puskemas habis, biasanya menggunakan obat pribadi tenaga kesehatan disana yang buka praktek. Kendala dalam pemenuhan obat terletak pada akses menuju dinas kesehatan tempat dimana obat itu diambil. Dengan adanya kendala jarak yang cukup jauh dan medan jalan yang sangat sulit, obat yang diperuntukan untuk desa Temajuk sering terlambat.
- 2) Sinyal komunikasi yang tidak lancar sehingga mengganggu sistem informasi puskesmas.
- 3) Belum beroperasinya ambulan karena ambulan yang disediakan untuk puskesmas temajuk belum sampai ke puskesma temajuk.
- 4) Belum tersedia dokter gigi.

c. Hak Atas Pendidikan

Pendidikan di Desa Temajuk tentu saja

tidak dapat lepas dari indikator pelayanan pendidikan yang berlaku secara nasional, dalam hal ini kita mengacu pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Selain itu terdapat pula indikator layanan pendidikan dalam International Covenant On Civil, Social, and Cultural Rights (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 11 Tahun 2005 dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan
- 2) Akses
- 3) Keberterimaan
- 4) Adaptabilitas

Pertama, terkait dengan ketersediaan terdapat sub bahasan a) bangunan sekolah, b) fasilitas penunjang, c) buku, dan d) tenaga pengajar. Desa Temajuk memiliki 1 bangunan TK, 2 bangunan SD, 1 bangunan SMP, dan 1 bangunan SMA. Sedangkan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bangunan masih menggunakan gedung lumbung desa. Bangunan dua SD yang ada di Temajuk terdiri dari satu lantai dengan jumlah ruang kelas sesuai jumlah rombongan belajar (di SD 19 Temajuk). Sedangkan di SD 16 Temajuk terdapat kekurangan satu ruang kelas, hanya ada lima ruang kelas untuk enam rombongan belajar. Untuk menyikapi keadaan tersebut, proses belajar mengajar untuk kelas 5 yang tidak memiliki ruang kelas diadakan di ruang perpustakaan. Kondisi ini menghambat proses belajar mengajar karena di ruang perpustakaan tidak terdapat kursi belajar, sehingga siswa-siswa duduk di lantai yang dialasi karpet plastik. Kemudian dari lantai bangunan itu sendiri masih menggunakan semen saja, sehingga mudah berdebu dan mengganggu kenyamanan

belajar para siswa.

Selanjutnya, dari segi fasilitas penunjang SD telah mempunyai fasilitas berupa KIT IPA dan KIT IPS. Namun, kepemilikan fasilitas tidak merata karena di SD 16 Temajuk lebih lengkap daripada SD 19 Temajuk. Untuk fasilitas penunjang kegiatan olahraga tiap sekolah di Desa Temajuk telah memiliki lapangan masing-masing. Hal ini tidak lepas dari luasnya lahan yang dimiliki sekolah. Sedangkan untuk SMP dan SMA yang ada di Desa Temajuk sudah memiliki ruang laboratorium, namun ketiadaan listrik membuat laboratorium tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Selain tidak tersedianya listrik, laboratorium belum dapat dimanfaatkan karena hanya menyediakan alat-alat saja tanpa ada bahan praktikum.

Ketersediaan layanan pendidikan juga diukur dari ketersediaan buku teks pelajaran. Di SD, ketersediaan buku teks sebagai pedoman belajar siswa masih belum mencukupi. Idealnya setiap siswa mendapat satu perangkat, namun di Desa Temajuk rata-rata satu perangkat digunakan oleh lebih dari satu orang siswa. Bahkan untuk tingkat SMP, masing-masing siswa hanya dipinjam dua buah buku teks saja. Sedangkan di SMA, keberadaan buku teks mulai disingkirkan oleh adanya Lembar Kerja Siswa (LKS) padahal idealnya LKS hanya pelengkap dari buku teks, bukan sebagai pegangan utama dalam proses belajar mengajar. Kondisi ini belum dapat memenuhi kondisi minimal seperti pada pasal 2 ayat (2) huruf (b) angka 1 dan 2.

Aktor pendidikan tentu bukan hanya siswa, namun juga tenaga pengajar. Keberadaan tenaga pengajar di sekolah-sekolah di Desa Temajuk belum dapat dikatakan memenuhi standar minimal karena masih terdapat kekurangan tenaga pengajar untuk sekolah dasar. Sedangkan di sekolah

menengah problem yang dihadapi adalah ketiadaan guru untuk beberapa mata pelajaran. Di SMA 2 Paloh sendiri tidak terdapat guru mata pelajaran Kimia dan Sosiologi. Selama ini mata pelajaran Kimia diberikan oleh guru Fisika, sedangkan mata pelajaran Sosiologi diberikan oleh guru mata pelajaran IPS yang lain. Meskipun demikian, adanya tambahan tenaga pengajar dari program SM-3T dapat mengatasi masalah tersebut sementara waktu.

Masalah utama terkait tenaga pengajar adalah mayoritas mereka bukan penduduk domisili Temajuk, seringkali akhir pekan mereka pulang ke rumah yang rata-rata berada di pusat kecamatan atau bahkan berbeda kecamatan. Seringkali di hari Senin para guru belum kembali ke Temajuk sehingga tidak ada yang mengisi kelas (karena jumlah guru pun terbatas). Kasus lain adalah ketika guru harus menghadiri pertemuan di UPT Pendidikan Kecamatan atau Dinas Pendidikan Kabupaten, maka tidak ada guru lain yang bisa menggantikan sehingga proses belajar mengajar di kelas tidak dapat dilangsungkan.

Kedua, pembahasan terkait akses pendidikan yang terdiri dari sub bahasan a) jarak, b) biaya, c) jumlah sekolah. Terkait jarak, Desa Temajuk belum dapat memenuhi standar minimum layanan pendidikan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (a) angka 1 yang mengatur bahwa jarak dari pemukiman terjauh sampai ke sekolah tidak boleh lebih dari 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP. Realita di Desa Temajuk menunjukkan jarak dari pemukiman terjauh adalah 4,5 km untuk SD dan 7 km untuk SMP. Namun, masyarakat menganggap hal tersebut bukanlah hambatan karena pendidikan masih dapat mereka akses. Terlebih ketika saat ini sudah terdapat SMA di Desa Temajuk.

Selanjutnya mengenai biaya pendidikan, seperti daerah lain pada

umumnya SD dan SMP di Desa Temajuk tidak memungut biaya dari siswa karena sudah ada Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan lain dari Pemerintah. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi SMA. Pihak sekolah masih menarik iuran bulanan dari para siswa. Hal tersebut dilakukan karena terbatasnya jumlah BOS yang diterima pihak sekolah. Besar kecilnya dana dari BOS tergantung pada banyak sedikitnya jumlah siswa di sekolah tersebut. Karena jumlah siswa di SMA 2 Paloh hanya 80 siswa, maka dana BOS yang didapat pun terbatas, sehingga tidak mampu untuk menanggung seluruh pengeluaran dan sekolah pun terpaksa menarik iuran bulanan dari orang tua siswa.

Jumlah sekolah di Desa Temajuk seperti sudah disebutkan sebelumnya terdapat dua SD yakni SD 16 Temajuk dan SD 19 Temajuk, satu SMP yakni SMP 4 Paloh, dan satu SMA yakni SMA 2 Paloh. Disamping itu terdapat satu buah PAUD dan satu buah TK swasta. Dengan kondisi tersebut kesempatan untuk memilih sekolah sangat terbatas bahkan untuk sekolah lanjutan tidak ada pilihan. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat persaingan antarsiswa dalam hal kualitas pendidikan. Bagaimanapun nilai yang diperoleh tetap akan masuk pada sekolah yang sama. Keadaan tersebut tentunya kurang baik bagi perkembangan pendidikan di Desa Temajuk.

Ketiga, menyoal keberterimaan terdapat sub bahasan sebagai berikut: a) kurikulum dan muatan lokal, b) bahasa pengantar, c) metode mengajar, dan d) pelatihan dan sertifikasi guru. Kurikulum sekolah di Desa Temajuk menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau sama dengan kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah. Namun demikian Pemerintah pernah menetapkan penggunaan kurikulum 2013 sebelum

akhirnya dicabut dan kembali lagi ke KTSP dikarenakan alasan ketidakmampuan teknis dari sekolah-sekolah penyelenggara. Hal ini tidak berdampak sama sekali di Desa Temajuk karena bahkan mereka belum sempat merasakan penggunaan kurikulum 2013. Selanjutnya mengenai muatan lokal terdapat beberapa mata pelajaran yang dikelompokkan ke dalam muatan lokal, diantaranya: agroindustri, keterampilan, dan budi pekerti.

Mengenai bahasa pengantar, sekolah di Desa Temajuk pada dasarnya menggunakan bahasa Indonesia. Namun, karena para siswa kebanyakan tidak fasih dalam menggunakan bahasa Indonesia, para guru pun mencampurkan dengan bahasa lokal dalam hal ini bahasa Sambas. Hal ini berlaku untuk guru-guru yang berasal dari daerah Kabupaten Sambas. Sedangkan untuk guru yang berasal dari luar Sambas yang notabene tidak menguasai bahasa Sambas akan tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa pengantar. Kondisi ini menjadi hambatan bagi para siswa karena banyak kosakata dalam bahasa Indonesia yang mereka tidak mengerti, sehingga harus berkali-kali menanyakan pada guru untuk dideskripsikan.

Metode pembelajaran menjadi kunci penting agar siswa dapat menyerap dengan baik materi yang disampaikan. Metode belajar yang digunakan di sekolah-sekolah di Temajuk masih berfokus pada metode klasik ceramah. Hal tersebut dikarenakan sulitnya mencari model pembelajaran yang lain di tengah berbagai keterbatasan yang dimiliki. Para guru mendambakan bisa mengajar dengan audio-visual agar siswa dapat lebih tertarik pada materi pembelajaran dan dapat lebih mudah mencerna. Ketiadaan listrik menjadi problem utama keinginan para guru tersebut belum dapat terwujud. Siswa-siswa

antusias dalam belajar ketika dicoba model pembelajaran dengan menggunakan in-focus. Akan tetapi cara itu tidak dapat terlalu sering digunakan karena biaya untuk menghidupkan diesel sebagai sumber listrik terlampau besar. Tingkat keefektifan pembelajaran dengan kondisi sekarang dimana para guru mayoritas menggunakan model ceramah hanyalah pada 15-20 menit pertama pembelajaran.

Indikator terakhir keberterimaan adalah pelatihan dan sertifikasi guru. Pelatihan untuk para guru beberapa kali diadakan oleh Dinas Pendidikan tetapi tidak selalu dapat dihadiri oleh guru sekolah di Temajuk. Hal ini dikarenakan ketika guru pergi mengikuti pelatihan di kabupaten tidak ada yang menggantikan untuk mengajar di kelas. Sedangkan mengenai sertifikasi guru di Desa Temajuk terhitung masih sangat terbatas. Misalkan saja di SMA 2 Paloh dari tujuh orang guru PNS baru ada dua orang guru yang mendapat sertifikasi. Kondisi yang lebih baik terdapat di SD 16 Temajuk, dari delapan orang guru PNS tiga orang telah mendapat sertifikasi sehingga memenuhi standar minimum pada pasal 2 ayat (2) huruf (a) angka 7. Sedangkan terkait pengawasan dari dinas pendidikan dirasa belum memenuhi standar minimum karena dilakukan rata-rata tiga kali setahun, belum mencapai standar satu kali setiap bulan seperti diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013.

Keempat, pembahasan tentang adaptabilitas setidaknya dapat dibagi ke dalam tiga sub pembahasan, yaitu a) teknologi informasi, b) globalisasi, dan c) pendidikan kewarganegaraan. Teknologi informasi merupakan hal yang asing bagi pendidikan di Temajuk. Kedua sekolah dasar yang ada di Temajuk sama sekali tidak mempunyai laboratorium komputer sehingga siswa

tidak diajarkan untuk berkenalan dengan teknologi. Sedangkan di SMP 4 Paloh terdapat 10 unit komputer dan di SMA 2 Paloh terdapat 15 unit komputer namun tidak dipergunakan sama sekali. Hal ini sekali lagi akibat dari ketiadaan listrik, terutama di siang hari. Informasi mengenai pendidikan sangat terbatas di Temajuk. Ketiadaan akses kepada informasi -tidak adanya sinyal telepon seluler apalagi sinyal internet- itulah yang menjadi penghambat proses pendidikan disana. Sebagai contoh, siswa SMA tidak mengetahui informasi mengenai Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan Ujian Mandiri dari PTN-PTN. Dampak dari hal ini sangat terasa ketika dalam realitanya hanya sedikit dari siswa SMA yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, terlebih perguruan tinggi negeri.

Masyarakat Temajuk beserta dunia pendidikannya tidaklah anti terhadap arus globalisasi. Akan tetapi globalisasi itu sendiri masih sangat terbatas di masyarakat Temajuk. Keterbatasan yang tercipta karena hampir tiadanya arus komunikasi dan informasi. Globalisasi hanya terbatas pada tayangan televisi di malam hari. Sedang dalam dunia pendidikan belum ada dampak berarti dari proses globalisasi.

Pendidikan kewarganegaraan utamanya terkait dengan wawasan kebangsaan merupakan hal yang krusial di masyarakat perbatasan, termasuk masyarakat Temajuk. Oleh karenanya dunia pendidikan dalam hal ini sekolah harus bisa menjadi garda depan dalam mengusahakan pemenuhannya. Sekolah-sekolah di Temajuk menjalankan pendidikan kewarganegaraan seperti halnya sekolah di daerah lain pada umumnya yakni dengan upacara bendera, pramuka, dan

kegiatan sejenis. Perbedaan dengan daerah lain adalah di Temajuk seringkali penanaman kecintaan terhadap Indonesia dilakukan bekerjasama dengan pihak TNI. Namun, para guru mengeluh mengenai bagaimana teknik pembelajaran yang berwawasan kebangsaan. Mereka merasa masih belum menguasai dan membutuhkan sekolah lain yang bisa dijadikan role model penanaman wawasan kebangsaan. Kendala utama pendidikan kewarganegaraan terdapat pada tidak tersedianya guru pengampu khusus mata pelajaran ini serta buku teks yang jumlahnya terbatas untuk dapat digunakan dalam proses belajar mengajar.

2. **Upaya Negara dalam Memenuhi Hak Ekosob Masyarakat Temajuk dan Korelasi antara Pemenuhan Hak Ekosob Masyarakat Temajuk terhadap Ketahanan Nasional**

Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kehidupan nasional untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional Indonesia. Mengukur ketahanan nasional dapat dilihat dari dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan keamanan dan kesejahteraan.⁵ Dewasa ini, pendekatan keamanan sudah mulai perlahan ditinggalkan dan bergeser ke arah pendekatan kesejahteraan. Dalam kaitannya dengan konsepsi ketahanan nasional, pemenuhan hak ekosob dapat dilihat dari kacamata pendekatan kesejahteraan. Itulah alasan hak ekosob dapat dijadikan sebagai salah satu indikator signifikan untuk mengukur kesejahteraan

⁵ Lemhanas, 1995, *Disiplin Nasional: Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, dan Pembangunan Nasional*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.21.

tersebut. Secara teoritik, tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang dihadapi Indonesia selalu ditujukan pada aspek sosial Ketahanan Nasional, sehingga penanggulangannya merupakan sesuatu yang sangat penting dan kritis.⁶ Hal ini menambah urgensi menilai tingkat kesejahteraan melalui hak ekosob masyarakat. Kesejahteraan merupakan kebutuhan yang mendasar dan esensial, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bahasa lain, kesejahteraan merupakan nilai intrinsik yang mendasari pencapaian kondisi Ketahanan Nasional. Kesejahteraan untuk mewujudkan ketahanan nasional dapat diilustrasikan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya, tak lain untuk kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah dan jasmaniah. Penelitian ini memfokuskan hak ekosob pada tiga bidang, yaitu pangan, pendidikan dan kesehatan. Dalam teori ketahanan nasional, ketiga bidang ini terkualifikasi dalam aspek sosial ketahanan nasional, atau yang dikenal dengan lima aspek sosial (pancagatra) dan bersifat dinamis.

Gatra ekonomi berkaitan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, individu maupun kelompok. Pembangunannya ialah jawaban untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Gatra sosial budaya terkhusus pendidikan mampu merubah dan mengembangkan sikap, tingkah laku, dan nilai sosial budaya ke arah yang dikehendaki. Pendidikan dengan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi ketahanan sosial budaya. Gatra sosial budaya juga mencakup kondisi sosial ekonomi yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik antara lain sandang, pangan, papan, kesehatan, gizi, dll. Pembangunan sosial budaya, baik dalam aspek pendidikan dan kesehatan, menjawab tantangan untuk terbinanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia sebagai sumber dan kekuatan dasar kehidupan sosial budaya bangsa, baik dalam kadar sikap mental, kondisi

fisik, dan kecerdasan yang lebih sesuai dengan peranannya, mewujudkan sekuritas sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial pada umumnya.⁷ Untuk mengetahui kekuatan ketahanan nasional tersebut, maka dilakukan penilaian kualitatif dan kuantitatif atas perwujudan kesejahteraan dan keamanan tiap-tiap gatra.

Ketahanan nasional dapat ditinjau dari 2 sisi. Pertama, mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat saat ini dan hubungannya dengan ketahanan nasional. Kedua, mengenai potensi ancaman terhadap ketahanan nasional sebagai konsekuensi dari lemahnya upaya peningkatan kesejahteraan. Sesuai temuan di lapangan, meskipun tingkat pemenuhan hak ekosob masyarakat Temajuk saat ini masih sangat rendah, namun ketahanan nasional masyarakat Temajuk masih tergolong cukup tinggi. Hal ini disebabkan:

- 1) Masyarakat menganggap Pemerintah masih memberikan perhatian kepada masyarakat dan terus berupaya. Hal ini terlihat dari bahwa masyarakat secara gamblang menjelaskan bahwa perhatian Pemerintah dalam bentuk nyata masih terlihat meskipun intensitasnya masih sangat minim. Program-program pemberdayaan masih ada, bahkan cenderung bertambah dari tahun ke tahun. Di Temajuk setidaknya ada dua metode yang digunakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. 1) pemberdayaan dan 2) partisipatif. Pemberdayaan bertumpu pada program-program Pemerintah yang sifatnya top-down, di sisi lain partisipasi masyarakat untuk terlibat secara penuh dalam program-program tersebut bersifat bottom-up. Hal lain yang melandasi partisipasi masyarakat cukup baik adalah adanya kesadaran masyarakat bahwa mereka sangat

⁶ *Ibid.*, hlm.26.

⁷ *Ibid.*, hlm.28-29.

- memerlukan tangan-tangan lain untuk membantu kehidupan mereka di tengah-tengah keterbatasan. Hasil yang ada saat ini merupakan perpaduan dua metode tersebut, meskipun demikian inisiatif tetap dipegang oleh Pemerintah;
- 2) Adanya pandangan “kesejahteraan subjektif”. Dalam studi kesejahteraan, kesejahteraan subjektif dimaknai sebagai adanya penilaian yang lebih tinggi tentang kebahagiaan dan kepuasan hidup yang cenderung seseorang bersikap sepertinya lebih bahagia dan lebih puas dengan kondisi hidup yang saat ini dialami. Kesejahteraan seseorang tentang kesejahteraan sendiri sangatlah penting. Pandangan ini membuat masyarakat masih merasa sejahtera dengan kondisi saat ini. Penuturan masyarakat menyiratkan pemakluman atas kondisi yang ada, menganggap bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat saat ini merupakan kondisi yang lumrah. Meskipun terdapat suara-suara sumbang dalam menilai kebijakan Pemerintah termasuk mengenai program-program peningkatan kesejahteraan, namun hal ini tidak sampai pada level lahirnya revolusi sosial sebagai reaksi sikap resisten dan keputusan masyarakat. Selain itu, Temajuk sebagai desa yang terbentuk karena infiltrasi untuk kepentingan kedaulatan, sehingga desa terbentuk dalam waktu yang sangat cepat, hal ini menyebabkan sarana penunjang sangat minim ketersediaannya, maka demikian pula dalam hal pemenuhan hak ekososob masyarakat, butuh akselerasi oleh pihak eksternal agar masyarakat menjadi mandiri lebih cepat dan pemenuhan hak ekososobnya lebih baik;
 - 3) Alasan historis bahwa eksodus masyarakat ke Temajuk pada awalnya bertujuan untuk mengamankan wilayah Indonesia dari kelompok komunis yang memiliki basis di wilayah temajuk saat itu. Kalimantan Barat dan sekitarnya dikenal sebagai basis PGRS Paraku di era tahun 60-70 an. Desa Temajuk terbentuk dari proses infiltrasi karena kepentingan kedaulatan. Istilahnya pengamanan dengan mendatangkan masyarakat, mereka dibentuk menjadi masyarakat untuk mengamankan wilayah. Salah satu upaya menetralsir daerah ini ialah Pemerintah mengadakan program pembukaan lahan permukiman ke daerah Temajuk. Seiring waktu, masyarakat semakin banyak yang menghuni desa ini, dan dengan inisiatif sendiri untuk menetap di Temajuk. Dalam kasus ini, terbentuknya Temajuk sebagai desa tidak secara natural, namun terdapat unsur pendorong eksternal agar masyarakat membentuk desa. Perpindahan penduduk atas kepentingan kedaulatan memberikan modal yang cukup atas paradigma nasionalisme yang mereka bawa. Dan hal tersebut secara terus menerus diturunkan ke generasi-generasi dibawahnya.
- Pada sisi kedua, mengenai potensi ancaman terhadap ketahanan nasional sebagai konsekuensi dari kurangnya upaya peningkatan kesejahteraan. Hal ini sangat jelas terlihat yang terindikasi pada:
- 1) Bidang pangan, terutama sembako berupa beras dan gula. Sebagian besar masyarakat masih mengusahakan kebutuhan pokoknya berupa beras dan gula dari negara tetangga Malaysia.

Selain karena harga yang lebih terjangkau, kualitasnya pun dianggap lebih baik.

- 2) Adanya sikap komparasi oleh masyarakat terhadap fasilitas pendidikan antara yang ada di Temajuk dengan Teluk Melano, Malaysia. Hal ini sangat terlihat pada fasilitas bangunan Sekolah Dasar. Bangunan Sekolah Dasar di Malaysia dibangun 4 lantai, sudah dialiri listrik 24 jam, tersedia fasilitas laboratorium komputer, dan sistem pembelajaran yang lebih modern. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi di Temajuk. Sikap komparasi ini menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan ini ialah bahwa secara empiris kondisi ekonomi sosial budaya masyarakat Temajuk terutama ditinjau dari sektor pangan, pendidikan, dan kesehatan tidak berdampak bagi ketahanan nasional, namun secara teoritis kondisi ini dapat mengancam ketahanan nasional. Sifat ketergantungan bahan pokok menjadi indikator kuat mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat, dan sikap komparasi masyarakat atas pelayanan publik yang disediakan Pemerintah seperti bangunan sekolah merupakan indikasi adanya ancaman tersebut. Ibarat bom waktu, potensi ini dapat sewaktu-waktu menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional jika tidak ada antisipasi dan penanggulangan yang baik. Sehingga dalam kacamata teoritis ketahanan nasional, aspek pendekatan kesejahteraan yang dapat dinilai melalui pemenuhan hak ekonomi sosial budaya budaya mempengaruhi ketahanan nasional itu sendiri.

D. Kesimpulan

Penting untuk disadari, bahwa pada hakikatnya pemenuhan hak ekosob sebagai pilar kesejahteraan masyarakat di perbatasan sangat

penting karena perbatasan memiliki nilai-nilai strategis, meliputi:

- 1) Mempunyai potensi sumber daya yang besar pengaruhnya terhadap aspek ekonomi, demografi, politis, dan hankam, serta pengembangan ruang wilayah di sekitarnya;
- 2) Merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat baik di wilayah yang bersangkutan maupun di wilayah sekitarnya;
- 3) Memiliki dampak terhadap kondisi politik dan pertahanan keamanan nasional dan regional

Meskipun demikian, kondisi pemenuhan hak ekosob di Temajuk masih sangat memprihatinkan. Untuk layanan pendidikan, kesehatan, dan pangan tidak dapat dinikmati masyarakat Temajuk dengan layak. Bahkan, dalam beberapa hal masih belum memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan Pemerintah sendiri. Uniknya, walaupun kondisi kesejahteraan mereka berada di bawah standar yang ada, tetap saja nasionalisme masyarakat Temajuk dapat dikatakan masih tinggi. Masyarakat masih dapat memaklumi kondisinya yang tinggal di daerah perbatasan yang jauh dari berbagai akses. Hal ini sesuai dengan teori kesejahteraan subjektif, dimana suatu masyarakat telah menganggap dirinya sejahtera, walaupun pada kenyataannya kondisi mereka masih tidak baik. Akan tetapi, ancaman untuk terjadinya disintegrasi bangsa di Temajuk cukup berpotensi. Penyebabnya karena berdasarkan teori kesejahteraan suatu masyarakat akan berbanding lurus dengan ketahanan nasional. Selain itu, di bidang pendidikan, masyarakat sering membandingkan bagaimana kondisi mereka dengan masyarakat dari wilayah Malaysia yang sangat timpang. Masyarakat Temajuk juga masih sangat bergantung pada Malaysia untuk pasokan pangan mereka khususnya beras dan gula.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abubakar, Mustafa. 2006, *Menata Pulau-pulau Kecil Perbatasan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Indah Huruswati, *et al.*, 2012, *Evaluasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Desa Perbatasan Kalimantan Barat*, P3KS Press, Jakarta.
- Kaelan dan Zubaidi. Achmad, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta.
- Lemhanas, 1995, *Disiplin Nasional: Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, dan Pembangunan Nasional*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Suradinata, Ermaya, 2005, *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI*, Suara Bebas, Jakarta.

B. Jurnal

- Triyana, Haribetus Jaka, Aminoto, "Implementasi Standar Internasional Hak Ekosob oleh Pemerintah Provinsi DIY", *Mimbar Hukum*, Volume 21, nomor 3, Oktober 2009.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota .
- Permentan RI Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan Provinsi dan kabupaten/Kota.
- Permenkes Nomor 741/Menkes/Per/VIII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Cakupan Kabupaten/Kota.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.